RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ,terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Juli 2022

Plh. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

PEBRIALIN, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630118 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

1.4. Sistematika Penulisan..... 10

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra.. 12

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan..... 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 19

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan 30

3.3. Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 39

BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Hal

II.1-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kota Batam 14

II.2-1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam 18

II.3-1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan pada Kegiatan Tahun 2021 Dinas Perhubungan 20

II.4-1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Batam 23

II.5-1 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 26

III.2-1 Tujuan dan Sasran Kerja Dinas Perhubungan TA 2023 ... 31

III.3-1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Batam 36

IV-1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 (Tabel berasal dari SIPD) 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah rancangan renja selesai dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD beserta hasil musrenbang tingkat kota. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting

dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

Peran penting transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan, disebutkan disemua undang-undang sektoral Perhubungan yaitu UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU. No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempuntai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrase nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini di kota Batam masih terkait konektivitas, akses transportasi yang mudah, aman, nyaman dan lancar ke berbagai tempat merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani hampir disemua daerah. Banyak hambatan-hambatan yang harus ditangani, karena urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan secara baik dengan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5490);
10) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6323);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
24) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

26) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
35) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
36) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
37) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
38) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
39) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
40) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87)

41) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
42) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).
43) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
44) Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Khusus untuk Kecamatan dan Perkimtan)
45) Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas tahun 2023

2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Mengingat Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 berada diantara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam atau Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam atau Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 - 2026, maka pelaksanaan evaluasi kinerja pada Renja Tahun 2021 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 serta dapat mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp.52.620.450.358,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.47.011.080.846,08 atau sebesar 89,34%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.5.609.369.511 atau 10,66%.

Dalam penganggaran tahun 2021 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan

indikator kinerja disusun mengikuti program dan Kegiatan yang baru. Dinas perhubungan melaksanakan 3 Program 14 kegiatan dan 27 sub kegiatan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun dapat dilihat pada Tabel II.1-1 sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Tabel II.1-1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.15.	**URUSAN PERHUBUNGAN**								
2.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.15.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**71%**	**5%**	**6%**	**120%**	**61%**	**0%**	**0%**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	**3.698 Unit**	**2.656 Unit**	**2656 unit**	**100%**	**3.197 Unit**	**3.197 Unit**	**86%**
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	-	-	100%	-	-
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	51%	54%	106%	63%	-	-
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	**100 Orang Jukir**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	80%	70%	88%	84%	-	-
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	**75%**	**70%**	**65%**	**92%**	**73%**	**-**	**-**
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	58%	96%	166%	61%	-	-
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	**33%**	**26%**	**38%**	**146%**	**27%**	-	-
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	90%	80%	89%	90%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.15.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut**	**49%**	**49%**	**49%**	**100%**	**49%**	**49%**	**100%**
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	67%	67%	100%	67%	67%	100%
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Berdasarkan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 dan Capaian Renstra, program dan kegiatan yang disajikan hampir semuanya mencapai 100%, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, kegiatan ini mempunyai target kinerja persentase titik parkir yang dikelola, dari 80% target yang ditetapkan hanya tercapai 70% hal ini masih pengaruh dari wabah Covid-19 dimana banyak toko-toko yang tutup dan mobilitas masyarakat juga terbatas sehingga jumlah titik parkir yang dikelola mengalami penurunan. Kegiatan kedua yang tidak mencapai target kinerja yaitu Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja cakupan pelayanan operasional Bus Trans Batam (Koridor) dengan capaian kinerja 80% dari 90% yang ditargetkan atau hanya mencapai sebesar 89% yaitu dari 11 koridor yang ditargetkan untuk dioperasikan sampai dengan tahun 2021 UPT Pelayanan Jasa Transporasi hanya mampu mengoperasikan 8 Koridor.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.30

TABEL II.2-1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan			73%	75%	84%	89%	73%	41%	75%	89%	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota			38%	41%	44%	44%	41%	45%	43%	44%	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland			78%	88%	91%	94%	78%	33%	88%	94%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
3. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

TABEL II.3-1
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG PELAYANAN PADA KEGIATAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	banyak sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi kurang baik	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
4	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
5	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikam aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
6	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
7	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
8	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
9	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
10	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
		Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	Peremajaan angkutan Bus Sekolah
11	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Batam adalah:

1. Kebutuhan 11 Koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada sampai dengan tahun 2021 belum tercapai;
2. Pengoperasian *feeder* untuk mendukung *integrated transportation system* belum terlaksana;
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan perparkiran;
4. Belum optimalnya pengujian kendaraan terhadap kendaraan wajib uji (kendaraan angkutan penumpang dan barang)
5. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana Perhubungan (seperti shelter/halte, transfer point, terminal, jembatan penyeberangan orang (JPO), *traffic light*, rambu lalu lintas, rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), rambu parkir, papan nama jalan, cansteen, pagar pemisah, guardrail, cemin tikungan, *display info*, *warning light*, marka jalan, marka parkir, pita penggaduh, zona selamat sekolah (ZoSS), zebra cross, dll) untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas;
6. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (*hinterland*);

7. Belum terbentuknya moda transportasi yang modern di kota Batam;
8. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Dinas Perhubungan Kota Batam;

Dampak dan faktor penghambat dan pendorong terhadap visi misi Walikotayang terkait dengan capaian program dan formulasi penyelesaian dampak, yaitu ;

1. Jika pelaksanaan kegiatan terlambat atau tidak terlaksana akan berpengaruhpada target RPJMD dan mempengaruhi visi dan misi walikota. Hal ini bisa disebabkan rasionalisasi anggaran dan kondisi teknis lapangan
2. Tidak terserapnya aspirasi masyarakat melalui paket-paket pekerjaan dan juga akan mempengaruhi capaian target indikator
3. Belum maksimalnya serapan aspirasi masyarakat dan rencana kerja OPD

Penyelesaian dampak dapat dilakukan dengan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Meningkatkan Kinerja OPD.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.4 - 1 berikut ini :

Tabel T-C.31

TABEL II.4 - 1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**		**27.494.091.410,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**		**27.535.896.610,00**
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.409.387.510,00	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.409.387.510,00
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	265.224.000,00	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	265.224.000,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	259.861.300,00	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	259.861.300,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.198.126.400,00	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.198.126.400,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.717.737.400,00	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.717.737.400,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	685.560.000,00	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	685.560.000,00
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	8.958.194.800,00	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	9.000.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2.15.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**71%**	**29.460.332.150,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**71%**	**30.375.332.150,00**
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	**3.698 Unit**				**Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**3.698 Unit**	
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	-	-	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	915.000.000,00
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	4.948.065.500,00	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100%	4.948.065.500,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	7.606.382.300,00	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	75%	7.606.382.300,00
			Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai	**100 Orang Jukir**				**Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai**	**100 Orang Jukir**	
2.15.02.2.03	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	2.164.093.100,00	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	88%	2.164.093.100,00
			Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji	**75%**				**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji**	75%	
2.15.02.2.04	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	693.239.000,00	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	64%	693.239.000,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	264.000.000,00	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	264.000.000,00
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	**33%**				**Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam**	**33%**	
2.15.02.2.07	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	13.784.552.250,00	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	13.784.552.250,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2.15.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut**	**49%**	**7.859.623.550,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**49%**	**11.115.305.750,00**
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.706.129.800,00	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.706.129.800,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	6.153.493.750,00	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	9.409.175.950,00
					64.814.047.110,00					**69.026.534.510,00**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program/kegiatan dari masyarakat, kelurahan, kecamatan dimulai pada tahap peneyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah dan input data pada aplikasi *SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)*.

Beberapa usulan yang masuk ke Dinas Perhubungan kota Batam melalui Musrenbang masih berkaitan dengan usulan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan serta rehabilitasi pelabuhan atau dermaga di wilayah hinterland. Namun mengingat Pagu Anggaran Kota Batam yang tersedia terbatas sehingga dari semua usulan masyarakat yang masuk masih harus diverifikasi dan diprioritaskan kembali pada Forum Perangkat Daerah.

Hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tahun 2022 tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, usulan dan koreksi dari unsur masyarakat (Kelurahan/kecamatan) yang dapat lebih mempertajam usulan program/kegiatan dibidang Perhubungan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5 - 1, yaitu :

Tabel T-C.32

TABEL II.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	*PAGU DANA*
(1)	*(2)*	*(1)*	*(2)*	*(1)*	*(2)*
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		
I.1.	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya		
I.1.1.	*SUB KEGIATAN : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	*Simpang tiga Perum Victoria RW 016, Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang*	*Pembangunan Pagar Besi Pembatas Jalan Simpang Tiga Perum Victoria*	*150 m'*	*299.385.000*

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	*PAGU DANA*
(1)	*(2)*	*(1)*	*(2)*	*(1)*	*(2)*
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut**		
II.1.	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik		
II.1.1.	*SUB KEGIATAN : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal*	*RT.01/RW.01, Kel. Ngenang, Kec. Nongsa*	*Pembangunan Dermaga Apung / Ponton*	*20 Unit*	*1.560.195.621*
		RT.01/RW.03, Pulau Kubung, Kel. Ngenang, Kec. Nongsa	*Pembangunan Pelantar Beton*	*160 m^2*	*1.675.198.080*
		RT.04/RW.01, Kel. Ngenang, Kec. Nongsa	*Pembangunan Pelantar Beton*	*600 m^2*	*6.281.992.800*
		Dekat Rumah Samarudin RT.01/RW.02, Pulau Panjang, Kel. Sijantung, Kec. Galang	*Pembangunan Pelantar Beton*	-	-
		Camping RT.02 RW.02, Kel. Sembulang, Kec. Galang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*400 m^2*	*4.187.995.320*
		Pulau Korek, RT.04/RW .01, Kec. Galang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*140 m^2*	*1.465.798.320*
		Pulau Jaloh RT.03/RW.02, Kel. Pantai Gelam, Kec. Bulang	*Pembangunan Dermaga Apung / Ponton*	*32 m^2*	*1.450.156.608*
		RT.01/RW.06, Kel. Setokok, Kec. Bulang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*366 m^2*	*3.832.015.608*
		Pulau Seraya RT.05/RW.02, Kel. Batu Legong, Kec. Bulang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*80 m^2*	*837.599.040*
		Temoyong, RT.01/RW.01, Kel. Temoyong, Kec. Bulang	*Pembangunan Atap Dermaga*	*200 m^2*	*346.426.000*
		Bulang Lintang, RT.01/RW.01, Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang	*Pembangunan Dermaga Apung / Ponton*	*24 m^2*	*2.209.167.468*
		RT.05/RW. 03 Teluk Kangkung, Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*120 m^2*	*3.769.195.680*
		RT.04 / RW. 02 Kelurahan Pecong, Kec. Belakang Padang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*600 m^2*	*6.281.992.800*
		RT. 01 / RW. 01, Kel. Pecong, Kec. Belakang Padang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*375 m^2*	*649.548.750*
		Labun RT.01/RW.01, Kelurahan Pemping, Kec. Belakang Padang	*Pembangunan Ponton dan Pengatapan Pelantar Beton*	*32 m^2*	*1.475.597.952*
		Pulau Gara RT.22/RW.06, Kel. Kasu, Kec. Belakang Padang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*500 m^2*	*5.234.994.000*
		Pulau Abang RT.04 RW.01 Kel. Pulau Abang, Kecamatan Galang	*Pembangunan Pelantar Beton*	*1 Unit*	*3.500.000.000*
		Pulau Abang RT.03 RW.01 Kel. Pulau Abang	*Pembangunan Dermaga Apung / Ponton*	*1 Unit*	*2.500.000.000*
II.1.2.	*SUB KEGIATAN : Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal*	*Pelabuhan Pulau Mubut, Kel. Karas, Kec. Galang*	*Rehabilitasi dan Penambahan Ruang tunggu Pelabuhan Pulau Mubut*	*305 m^2*	*528.299.650*
		RT.01/RW.03 Pulau Petong, Kel. Pulau Abang, Kec. Galang	*Rehabilitasi Pelantar Beton*	*111 m^2*	*202.266.430*
		Bulang Lintang, RT.01/RW.01, Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang	*Rehab Pelabuhan Beton*	*211 m^2*	*2.209.167.468*
		Pulau Labu RT.06/RW.03, Kel. Batu Legong, Kec. Bulang	*Rehabilitasi Pelabuhan Umum + Atap*	*118 m^2*	*204.391.340*
		Pulau Amat Belanda, RT.03/ RW.04, Kel. Sekanak Raya, Kec. Belakang Padang	*Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pelabuhan*	*127 m^2*	*219.960.510*
					50.921.344.445

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

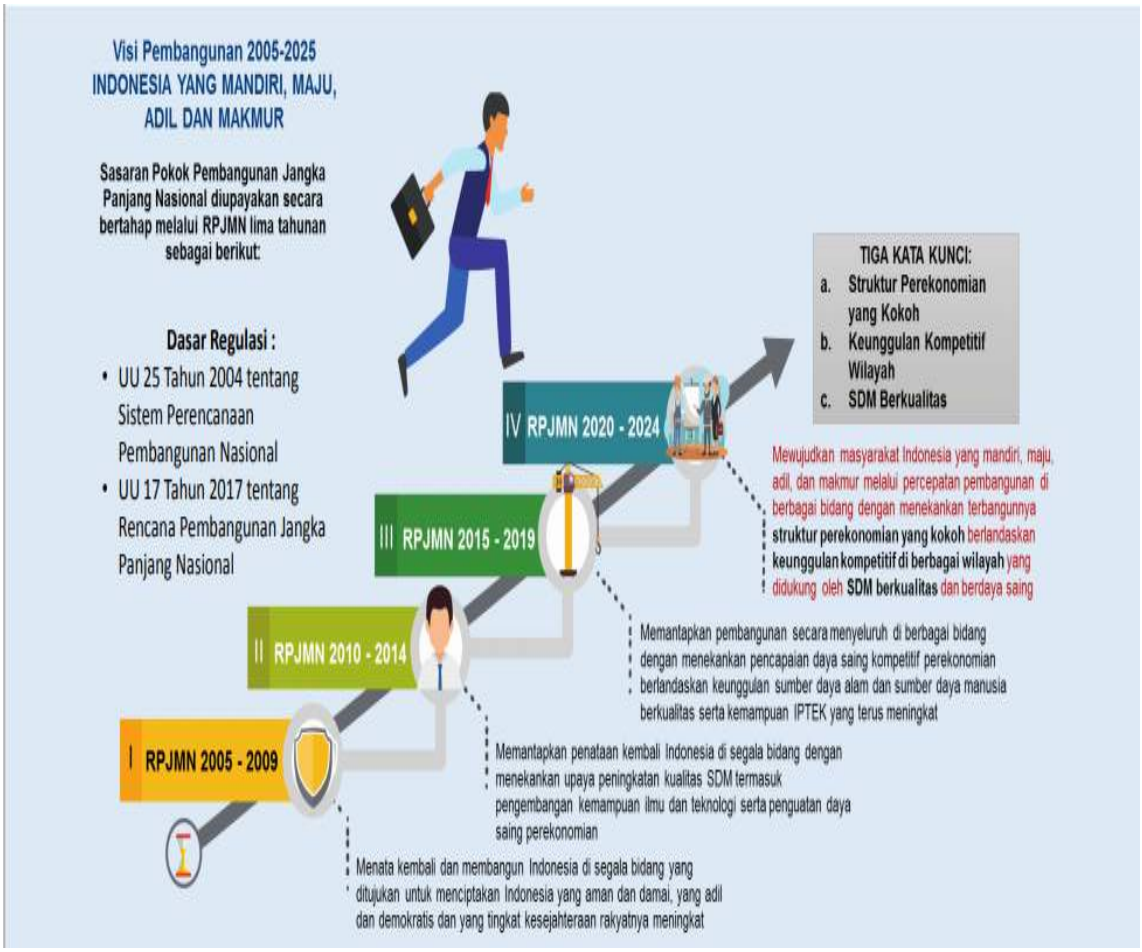

Pembangunan tahun 2022 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.

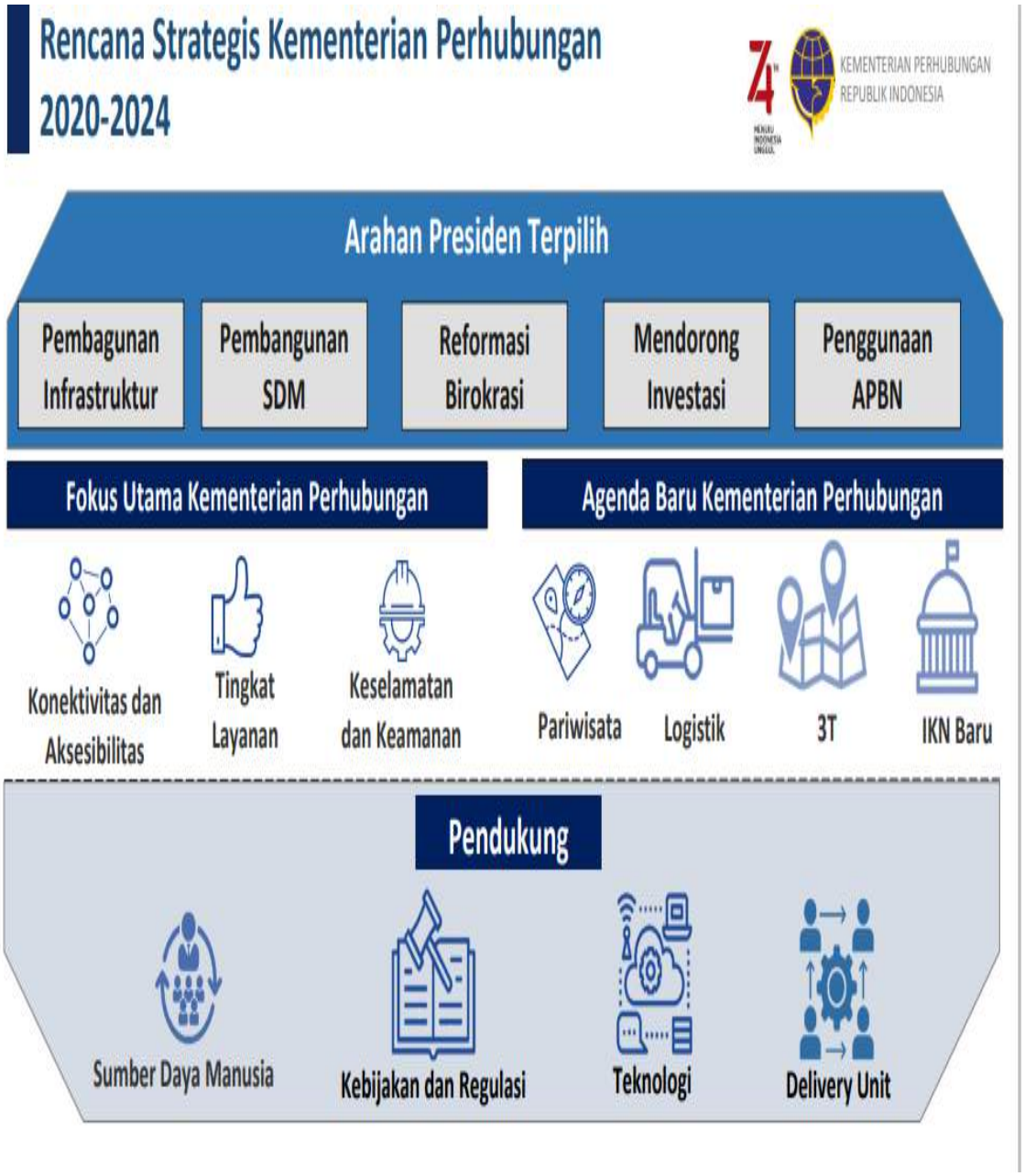

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2023

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu *Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang* dan misi ke 4 (empat) yaitu *Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.*

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.2 – 1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2023

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023
Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan PerkotaanPersentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perkotaan	64%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	84%
					Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	44%
Melanjutkan percepatan pembangunan didaerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	91%
				Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	89%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	**Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi**		Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas			
				Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Persentase Pelayanan Administrasi, sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpenuhi	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang direncanakan berjumlah 3 (tiga) Program Perangkat Daerah, 15 (lima belas) Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
    1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
        1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    1.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
        1.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
        1.2.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatiahn Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    1.3. Kegiatan Administrasi Umum
        1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
        1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        1.4.4. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    1.6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
    1.7.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
    2.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
        2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
        2.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
        2.1.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
        2.1.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
    2.2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
        2.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

2.3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.3.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2.4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

2.5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

2.5.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

2.6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :

3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Tabel TC-33

TABEL III.3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah**		**100%**	**27.494.091.410,00**			**100%**	**29.730.706.368,00**
1	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	13.409.387.510,00	APBD		100%	13.197.719.756,00
2	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	265.224.000,00			100%	-
3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	259.861.300,00	APBD		100%	254.916.200,00
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	1.198.126.400,00			100%	364.319.012,00
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2.717.737.400,00	APBD		100%	2.665.671.400,00
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	685.560.000,00	APBD		100%	748.080.000,00
7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	90%	8.958.194.800,00	BLUD		100%	12.500.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**		**71%**	**29.460.332.150,00**			**81%**	**36.077.042.000,00**
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		**3.698 Unit**				**4.199 Unit**	
		Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai		**100 Orang Jukir**				**200 Orang Jukir**	
		Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji		**75%**				**78%**	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		**33%**				**41%**	
8	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Kota Batam	-	0,00	APBD		-	-
6	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	Kota Batam	100%	4.948.065.500,00	APBD		100%	2.892.711.700,00
9	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	88%	2.164.093.100,00	APBD		88%	10.840.000.000,00
10	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Kota Batam	64%	693.239.000,00	APBD		64%	740.523.000,00
11	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Kota Batam	75%	7.606.382.300,00	APBD		85%	6.128.338.300,00
12	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	Kota Batam	100%	264.000.000,00	APBD		100%	275.469.000,00
13	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Kota Batam	90%	13.784.552.250,00	APBD		90%	15.200.000.000,00

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut**		**49%**	**7.859.623.550,00**			**49%**	**8.877.016.820,00**
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	Kota Batam	67%	1.706.129.800,00			100%	1.600.000.000,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	Kota Batam	100%	6.153.493.750,00			100%	7.277.016.820,00
					64.814.047.110,00				**74.684.765.188,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.64.814.047.110,00 yang tersebar di 3 Program 15 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel IV-1 yang diambil dari aplikasi SIPD berikut ini:

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**64,814,047,110**							**64,814,047,110**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**27,494,091,410**						**100 %**	**27,493,951,610**	
2	**15**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi**	**%**		**%**	**100 %**	**13,409,387,510**						**100 %**	**13,374,218,010**	
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/ bulan	13,243,067,510	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Perhubungan	73 Orang/bulan	13,207,898,010	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				32 Dokumen	166,320,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Perhubungan	32 Dokumen	166,320,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana**	**%**		**%**	**100 %**	**265,224,000**						**100 %**	**265,224,000**	
2	15	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				172 Paket	127,036,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL di Lingkungan Dinas Perhubungan	172 Paket	127,036,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	138,188,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL di Lingkungan Dinas Perhubungan	10 Orang	138,188,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**100 %**	**259,861,300**						**100 %**	**285,689,300**	
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,366,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	1 Paket	8,366,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	83,143,500	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	5 Paket	84,931,500	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	19,100,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	2 Paket	44,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	24,486,800	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	1 Paket	27,576,800	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	124,765,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan THL Dinas Perhubungan	38 Laporan	120,715,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi**	**%**		**%**	**100 %**	**1,198,126,400**						**100 %**	**1,207,326,400**	
2	15	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	737,480,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	2 Unit	737,480,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	103,430,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	22 Unit	112,630,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	357,216,400	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah	48 Unit	357,216,400	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**%**		**%**	**100%**	**2,717,737,400**						**100 %**	**2,717,737,400**	
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	805,695,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan	4 Laporan	805,695,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,912,042,400	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Perhubungan	12 Laporan	1,912,042,400	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang layak fungsi**	**%**		**%**	**100 %**	**685,560,000**						**100 %**	**685,560,000**	
2	15	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				99 Unit	631,630,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	99 Unit	631,630,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	51,530,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	6 Unit	51,530,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2,400,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan	1 Unit	2,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**1**	**02.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD**	**%**		**%**	**100 %**	**8,958,194,800**						**100 %**	**8,958,196,500**	
2	15	1	02.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	8,958,194,800	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Pelayanan Teknis (Unit Kerja)	1 Unit Kerja	8,958,196,500	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**%**		**%**	**100 %**	**29,460,332,150**						**100 %**	**30,455,033,850**	
2	**15**	**2**	**02.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang dibangun setiap tahunnya**	**%**		**%**	**100 %**	**4,948,065,500**						**100 %**	**5,942,765,500**	
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit	891,824,900	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	4 Unit	891,824,900	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				214 unit	3,306,499,600	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	214 unit	4,301,199,600	DINAS PERHUBUNGAN
						2. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Jalur Sepeda)				7.1 km							7.1 km		
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				16 Unit	396,070,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	16 Unit	396,070,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				125 Unit	353,671,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Sarana dan prasarana perhubungan	125 Unit	353,671,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**2**	**02.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Persentase titik parkir yang dikelola**	**%**		**%**	**88 %**	**2,164,093,100**						**88 %**	**2,164,093,100**	
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				628 Laporan	2,164,093,100	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Juru Parkir	628 Laporan	2,164,093,100	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**2**	**02.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase operasional pelayanan PKB**	**%**		**%**	**64 %**	**693,239,000**						**64 %**	**693,239,000**	
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				11 Unit	51,739,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	11 Unit	51,739,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10000 Dokumen	257,500,000	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	10000 Dokumen	257,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				3 Unit	384,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Kendaraan angkutan orang dan barang	3 Unit	384,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**2**	**02.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan operasional Bus Trans Batam (Koridor)**	**%**		**%**	**90 %**	**13,784,552,250**						**90 %**	**13,784,553,950**	
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	13,784,552,250	Kota Batam, Batam Kota, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	02. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan.	Masyarakat Kota Batam pengguna Bus Trans Batam	50 Unit	13,784,553,950	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut**	**%**		**%**	**49 %**	**7,859,623,550**						**49 %**	**6,865,061,650**	
2	**15**	**3**	**02.06**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut**	**%**		**%**	**67 %**	**1,706,129,800**						**67 %**	**1,706,129,800**	
2	15	3	02.06	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	1,706,129,800	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland	2 Laporan	1,706,129,800	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**3**	**02.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik**	**%**		**%**	**100 %**	**6,153,493,750**						**100 %**	**5,158,931,850**	
						Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	**%**		**%**	**67 %**							**67 %**		
2	15	3	02.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	4,677,944,750	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland	2 Unit	3,679,783,950	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	02.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				6 Unit	1,475,549,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	05. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	Masyarakat Hinterland	6 Unit	1,479,147,900	DINAS PERHUBUNGAN

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2023.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau ramgkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Perhubungan memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipasif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2023 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya.

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp. (0778) 459503 Fax. (0778) 452826
BATAM
Kode Pos : 29433

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Nomor : 1684/PR.01.03/XII/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;

b. bahwa apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan makan Dinas Perhubungan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja setiap tahunnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

LAMPIRAN : SK kepala Dinas Perhubungan
NOMOR : 1684/PR.01.03/XII/2021
TANGGAL : 16 Desember 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	KETUA TIM
II.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	SEKRETARIS TIM
III.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS	KETUA POKJA I BIDANG PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
III.1.	KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	ANGGOTA
III.2.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.3.	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS	ANGGOTA
III.4.	KA. UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	KOORDINATOR
III.5.	KA. TU UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
III.6.	STAF BIDANG LALU LINTAS	ANGGOTA
III.7.	STAF UPTD PELAYANAN JASA TRANSPORTASI	ANGGOTA
IV.	KEPALA BIDANG LAUT	KETUA POKJA II BIDANG EVALUASI
IV.1.	KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN	ANGGOTA
IV.2.	KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN	ANGGOTA
IV.3.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
IV.4.	KASUBAG KEUANGAN	ANGGOTA
IV.5.	STAF BIDANG LAUT	ANGGOTA
V.	KEPALA BIDANG ANGKUTAN JALAN	KETUA POKJA III BIDANG STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V.1.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG	ANGGOTA
V.2.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG	ANGGOTA
V.3.	KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGGOTA
V.4.	KEPALA UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.5.	KEPALA TU UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA
V.6.	STAF ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
V.7.	STAF UPTD PELAYANAN PARKIR	ANGGOTA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
VI.	**KEPALA BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN**	**KETUA POKJA IV BIDANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
VI.1.	KEPALA SEKSI PRASARANA ANGKUTAN LAUT	ANGGOTA
VI.2.	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS	ANGGOTA
VI.3.	KEPALA SEKSI PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	ANGGOTA
VI.4.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
VI.5.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA
VI.6.	STAF BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN	ANGGOTA
VI.7.	STAF SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA

KEPALA DINAS

SALIM, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001